MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD

: BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA PADANG PANJANG

TAHUN : 2025

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama		ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program: Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Sub Kegiatan: Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Tujuan: Terlaksananya Musrenbang RKPD tingkat Kota	 - Dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yakni UU No 25 tahun 2004 dan Permendagri No 86 tahun 2017, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan menggunakan pendekatan top down, bottom up, teknokratik, politis, aspiratif. - Musrenbang salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom up dan aspiratif - Kondisi saat ini pada RKPD tahun 2023 dan 2024 porsi terkait dengan isu-isu gender antara lain: disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga miskin, perempuan (janda), dll masih minim. - Usulan masyarakat lebih banyak di bidang fisik prasarana, usulan yang menjadi kebtuhan mayoritas perempuan, lansia maupun disabilitas masih jarang 	Akses - Undangan tidak menjangkau semua komponen masyarakat Partisipasi - Partisipasi perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki - Usulan perwakilan kelurahan dan kecamatan didominasi laki-laki Kontrol - Musrenbang hanya sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan dokumen perencanaan Manfaat - Kemampuan masyarakat menentukan usulannya tergantung pada prioritas pembangunan daerah	 Pengelola kegiatan belum responsif gender Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan responsive gender Pengusulan kegiatan baru tidak dapat dilakukan apabila tidak masuk dalam SIPD 	Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi Pelaksanaan kegiatan musrenbang lebih mengutamakan seremonial daripada substansi pembahasan Tingkat kehadiran pemangku kebijakan dan DPRD masih sedikit Makin tingginya tingkat pengawasan pada penyusunan perencanaan Masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas pembangunan dan		- Sosialisasi pelaksanaan perencanaan responsive gender - Penyelenggaraan musrenbang dengan mengundang keterwakilan perempuan minimal 30% - Pelaksanaan musrenbang guna peningkatan dengan menyampaikan kualitas perencanaan, tahapan-tahapan pelaksanaan	 Pelaksanaan musrenbang tahun 2023 dan 2024 peserta yang hadir 215 orang. Komposisi jenis kelamin 60,5% lakilaki dan 39,5% perempuan. Komposisi elemen yang hadir pemerintah 45%, swasta 3%, masyarakat 52% (ormas, LSM) Komposisi peserta dari kelompok umur anak-anak (0-18 tahun) 3% pemuda (18 – 30 th) 16% dewasa (30 – 60 th) 76% lansia (60 th ke atas) 5% Tingkat kehadiran disabilitas pada pelaksanaan musrenbang tahun 	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Input : Rp. 100.000.000,- Output : Jumlah kegiatan yang responsive gender dalam musrenbang Outcome : Terakomodirnya perencanaan pembangunan berbasis gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama		ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	- Komposisi jenis kelamin 60,5% laki-laki dan 39,5% perempuan Komposisi elemen yang hadir pemerintah 45%, swasta 3%, masyarakat 52% (ormas, LSM) - Komposisi peserta dari kelompok umur anak-anak (0-18 tahun) 3% pemuda (18 – 30 th) 16% dewasa (30 – 60 th) 76% lansia (60 th ke atas) 5% - Tingkat kehadiran disabilitas pada pelaksanaan musrenbang tahun 2023 dan 2024			kewenangan masing-masing pemerintah daerah - Musrenbang belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk didukung oleh pengganggaran yang maksimal - Domain politik dalam penyusunan penganggaran lebih dominan			2023 dan 20234 - Kurangnya usulan masyarakat berbasis gender - Terakomodirnya usulan musrenbang dalam Renja Perangkat Daerah	

Padang Panjang, 29 April 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

RUSDIANTO, S.IP, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19640402 198602 1 003

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD

: BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA PADANG PANJANG

TAHUN

: 2025

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan		ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Tujuan: Terwujudnya perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, Terwujudnya koordinasi penurunan stunting	-Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah membentuk Pokja PUG yang salah satu tugasnya menyusun perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender Kondisi saat ini di Kota Padang Panjang Pelaksanaan PPRG belum berjalan maksimal ditandai dengan Pokja PUG baru sebatas SK - Pemahaman Kepala OPD terkait dengan PUG belum Optimal - PUG masih dianggap sebagai tugas tambahan - Fokal Point dimasing OPD belum berjalan optimal ditandai dengan belum semua OPD mempromosikan PUG di masing masing OPD dan PUG belum dianggap sebagai kebutuhan	Akses - Terbatasnya informasi terkait dengan PUG dan PPRG - Kurangnya pemahaman ASN tentang PUG dan PPRG Partisipasi - Komitmen Kepala OPD masih kurang ditandai dengan minimnya kehadiran pada pelaksanaan Sosialisasi atau dalam menindaklanjuti dalam penyusunan GAP dan GBS Kontrol Manfaat - Manfaat penerapan GAP GBS dan penurunan stunting tidak langsung terasa - Belum semua OPD merasakan manfaat pelaksanaan GAP DBS	- Belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas OPD tentang pentingnya PUG	- PUG dianggap tidak menarik dan dianggap hanya mengurusi masalah perempuan saja - Masih kurangnya partisipasi stakeholders dalam mendukung PUG	Terwujudnya Perencanaan yang Responsif Gender	 Penyusunan surat edaran pelaksanaan PUG pada masing- masing OPD Penelaahan GAP dan GBS OPD Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PUG 	 OPD yang sudah membuat GAP dan GBS sudah 23 OPD Rapat monitoring pelaksanaan GAP dan GBS dilingkup Pemko Padang Panjang 	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusuna Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Input; Rp. 35.000.000,- Output: Penganggaran yang Responsif Gender, Penurunan angka stunting Outcome; Terwujudnya Pengarusutamaan Gender di Kota Padang Panjang, da

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
	-Belum semua OPD men indaklanjuti terkait Rekomendasi Kebijakan yang dikeluarkan Walikota Padang Panjang untuk mencantumkan Dasar Hukum, data terpilah dan isue gender di dalam Renstra OPD.							

Padang Panjang, 29 April 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

RUSDIANTO, S.IP, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19640402 198602 1 003

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD

: BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA PADANG PANJANG

TAHUN

: 2025

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan		ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program: Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tujuan: Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang (RKPD, RKPD-P, RPJMD, Renstra, Renja, dan Renja P)	- Dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yakni UU No 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Kerja Pemerintah). Pada tataran Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan jangka pendek yaitu Rencana Kerja (Renja). Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017	Akses - Partisipasi - Partisipasi keikutsertaan pejabat struktural dalam rapat penyusunan renja masih ada - Usulan perwakilan dalam Musrenbangyang merupakan tahapan awak perencanan pembangunan daerah masih didominasi laki-laki Kontrol - Dokumen perencanaan hanya sebatas memenuhi amanat dengan indikator kinerja yang belum ideal Manfaat - Kemampuan PD dalam penyusunan dokumen perencanaan masih belum optimal	 Pengelola kegiatan belum responsif gender Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada OPD terkait penyusunan perencanaan responsive gender Pengusulan kegiatan baru tidak dapat dilakukan apabila tidak masuk dalam SIPD yang tertuang dalam Renstra PD 	Kurang pahamnya PD dalam penyusunan dokumen perencanan Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi Pelaksanaan kegiatan musrenbang lebih mengutamakan seremonial daripada substansi pembahasan Tingkat kehadiran pemangku kebijakan dan DPRD masih sedikit Makin tingginya tingkat pengawasan pada penyusunan perencanaan Masih minimnya		- Sosialisasi pelaksanaan perencanaan responsive gender - Penyelenggaraan proses penyusunan dokumen perencanaan dimulai dari persiapan penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan akhir; dan. penetapan.	 Pelaksanaan musrenbang tahun 2023 dan 2024 peserta yang hadir 215 orang. Komposisi jenis kelamin 60,5% lakilaki dan 39,5% perempuan. Komposisi elemen yang hadir pemerintah 45%, swasta 3%, masyarakat 52% (ormas, LSM) Komposisi peserta dari kelompok umur anak-anak (0-18 tahun) 3% pemuda (18 – 30 th) 16% dewasa (30 – 60 th) 76% lansia (60 th ke atas) 5% Tingkat kehadiran disabilitas pada pelaksanaan musrenbang tahun 	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumer Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Input: Rp. 350.540.240,- Output: Jumlah kegiatan yang responsive gender dalam penyusunan dokumen perencanaan Outcome: Terakomodirnya perencanaan pembangunan berbasis gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
Nama			ISU GENDER		KEBIJAKAN DAN I	KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja	
	tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Penyusunan dokumen perencanaa bertujuan Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang diselenggarakan; Merumuskan permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan; Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan; dan Menjadi tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja - Kondisi saat ini pada RKPD			informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah - Musrenbang belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk didukung oleh pengganggaran yang maksimal - Domain politik dalam penyusunan penganggaran lebih dominan			2023 dan 20234 - Kurangnya usulan masyarakat berbasis gender - Terakomodirnya usulan musrenbang dalam Renja Perangkat Daerah		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
Kebijakan/Program/ Kegiatan		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	tahun 2023 dan 2024 porsi terkait dengan isu-isu gender antara lain : disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga miskin, perempuan (janda), dll masih minim. - Komposisi jenis kelamin 60,5% laki-laki dan 39,5% perempuan. - Komposisi elemen yang hadir pemerintah 45%, swasta 3%, masyarakat 52% (ormas, LSM) - Komposisi peserta dari kelompok umur anak-anak (0-18 tahun) 3% pemuda (18 – 30 th) 16% dewasa (30 – 60 th) 76% lansia (60 th ke atas) 5% - Tingkat kehadiran disabilitas pada pelaksanaan musrenbang							

Padang Panjang, 29 April 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

RUSDIANTO, S.IP, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19640402 198602 1 003

PENELAAHAN DOKUMEN GAP GBS TAHUN ANGGARAN 2025 OLEH TIM PENGGERAK / DRIVER PPRG BAGI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

